

**PERUBAHAN KEBIJAKAN IMIGRASI OPEN DOOR MENJADI  
KEBIJAKAN POINT BASED SYSTEM INGGRIS DI TAHUN 2016-2023**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Oleh:

**HERYANDA YURISMAN**

19323043

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN IMIGRASI OPEN DOOR KE KEBIJAKAN  
POINT BASED SYSTEM INGGRIIS DI TAHUN 2016-2023**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

**HERYANDA YURISMAN**

19323043

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERUBAHAN KEBIJAKAN IMIGRASI OPEN DOOR MENJADI**  
**KEBIJAKAN POINT BASED SYSTEM INGGRIS DI TAHUN 2016-2023**

**SKRIPSI**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh  
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional  
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya  
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

  
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 3 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

*15 Maret 2024*



Handwritten signature of Heryanda Yurisman.

---

*Heryanda Yurisman*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI .....	III
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM DAN FIGUR .....	VII
DAFTAR SINGKATAN .....	VIII
ABSTRAK .....	IX
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Cakupan penelitian .....	5
1.5 Tinjauan Pustaka .....	6
1.6 Kerangka Pemikiran .....	8
1.7 Argumen Sementara .....	10
1.8 Metode Penelitian .....	11
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian .....	11
1.8.3 Metode Pengumpulan Data .....	12
1.8.4 Proses Penelitian .....	12
1.9 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II</b> .....	14
<b>KEBIJAKAN IMIGRASI INGGRIS SEBELUM DAN SESUDAH BREXIT</b> .....	14
2.1 Kebijakan Imigrasi Open Door Inggris Masa Pra Brexit .....	14
2.2 Kebijakan Pemerintah Inggris Terhadap Isu Imigran Pasca Brexit .....	18
2.3 Kebijakan Imigrasi Point Based System Inggris Pasca Brexit .....	21
2.3.1 Batasan Gaji dan Skill .....	23
2.3.2 Jalur Masuk Pekerja Terampil .....	24
2.3.3 Jalur Masuk Pelajar .....	25
2.3.4 Jalur Masuk Lainnya .....	27
2.4 Masa Transisi Kebijakan Imigran Inggris Pasca Brexit Tahun 2021 .....	28
<b>BAB III</b> .....	32
<b>ANALISIS MENGAPA INGGRIS MEMUTUSKAN UNTUK MERUBAH KEBIJAKAN IMIGRASI MEREKA DARI OPEN DOOR POLICY MENJADI KEBIJAKAN POINT BASED SYSTEM DI TAHUN 2016-2023 MENGGUNAKAN TEORI POLICY CYCLE</b> .....	32
3.1 Agenda Setting .....	32
3.2 Policy Formulation .....	36
3.3 Decision Making .....	39

<b>3.4</b>	<b>Policy Implementation</b> .....	<b>43</b>
<b>3.5</b>	<b>Policy Evaluation</b> .....	<b>46</b>
<b>BAB IV</b>	.....	<b>48</b>
<b>PENUTUP</b>	.....	<b>48</b>
<b>4.1</b>	<b>Kesimpulan</b> .....	<b>48</b>
<b>4.2</b>	<b>Rekomendasi</b> .....	<b>49</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>50</b>

## DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM DAN FIGUR

Gambar 1 . Tahap Pembentukan Kebijakan Menurut Teori Policy Cycle .....	10
Table 1. Karakteristik dan Poin Yang Harus Dipenuhi Oleh Imigran Untuk Mendapatkan Visa Melalui <i>Point Based System</i> .....	25
Table 2. Rute Tanpa Perlu Adanya Pemenuhan Poin Yang Dibuat Oleh Pemerintah Inggris .....	45

## DAFTAR SINGKATAN

CEAS	: Common European Asylum System
EEA	: European Economic Area
MAC	: Migration Advisory Committee
RQF	: Regulated Qualification Framework
STEM	: Science, technologies, Engineering and Mathematician
ATAS	: Academic Technologies Approval Scheme
IELTS	: International English Language Testing System
SOL	: Skill Occupation list
ICT	: Information Communication Technologies
UK	: United Kingdom
UE	: Uni Eropa
AS	: Amerika Serikat



## ABSTRAK

Selama Inggris menjadi Anggota Uni Eropa, Inggris telah mendapat banyak kerugian yang dikarenakan kebijakan imigrasi *Open Door* yang diterapkan oleh Uni Eropa Untuk Seluruh negara anggotanya. Kebijakan imigrasi ini menyebabkan Inggris kehilangan kontrol atas perbatasan mereka dan mengakibatkan beberapa dampak di bidang ekonomi, sosial dan keamanan. Pada tahun 2020 Inggris telah resmi keluar dari Uni Eropa dan telah mengganti kebijakan imigrasi mereka menjadi kebijakan *Point Based System* di tahun 2021. pergantian kebijakan ini ditetapkan untuk memperbaiki kerugian yang didapat dari kebijakan imigrasi sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Inggris merubah kebijakan imigrasi mereka dari *Open Door* menjadi *Point Based System*. Penelitian ini menggunakan teori *Policy Cycle* yang diterapkan oleh Laswell yang mencakup 5 tahap dalam pembentukan kebijakan yaitu, *Agenda Setting*, *Policy Formulation*, *Decision Making*, *Policy Implementation* dan *Policy Evaluation*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menggunakan data yang dicari secara *online* melalui Jurnal, artikel media dan Informasi dari pemerintah Inggris. penelitian ini menunjukkan bahwa Inggris mendapat banyak kerugian dari besarnya jumlah imigran yang masuk dan dengan Kebijakan *Point Based System* yang menetapkan sistem Visa yang ketat.

**Kata Kunci:** *Brexit, Policy Cycle, Point Based System*

*During the time that Britain was a member of the European Union, Britain had suffered many losses due to the Open Door immigration policy implemented by the European Union for all its member countries. This immigration policy caused Britain to lose control over their borders and resulted in several economic, social and security impacts. In 2020, England officially left the European Union and changed their immigration policy to a Point Based System policy in 2021. This policy change was set to repair the losses suffered from the previous immigration policy. This research aims to analyze why the UK changed their immigration policy from Open Door to Point Based System. This research uses the Policy Cycle theory applied by Laswell which includes 5 stages in policy formation, namely, Agenda Setting, Policy Formulation, Decision Making, Policy Implementation and Policy Evaluation. This research uses a qualitative method using data searched online through journals, media articles and information from the British government. This research shows that England suffers a lot from the large number of immigrants entering and the Point Based System Policy which establishes a strict Visa system.*

*Keywords: Brexit, Policy Cycle, Point Based System*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Uni Eropa (UE) merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara Eropa. Uni Eropa dibentuk dengan tujuan untuk membentuk perdamaian, perekonomian yang stabil serta kelayakan hidup dan keadilan yang setara untuk semua masyarakat Eropa. Inggris atau Britania Raya merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk monarki konstitusional dan sistem pemerintahan parlementer. Di tahun 1973 Inggris pertama kali mencoba untuk bergabung ke dalam Masyarakat Eropa (sekarang Uni Eropa), namun dikarenakan banyaknya pihak yang keberatan mengakibatkan permintaan Inggris ditolak. Di tahun 1975 Inggris kembali mencoba dengan diadakan referendum 1975.

Inggris bergabung menjadi anggota Uni Eropa dengan motif mendapatkan keuntungan ekonomi. Dengan berakhirnya perang dunia II, Inggris memilih untuk bergabung dengan Uni Eropa untuk memulihkan ekonominya. Dengan keanggotaan yang didapat Inggris dari Uni Eropa Inggris memperoleh keuntungan dan kemudahan seperti tidak harus membayar tarif dan tidak memiliki hambatan tarif atau hambatan non tarif Untuk perdagangan di area Uni Eropa ( Sari, 2016). Setelah menjadi anggota Uni Eropa, Inggris memiliki peran penting dalam organisasi tersebut. Inggris menjadi anggota yang berkontribusi besar dalam berbagai bidang seperti di bidang pendanaan Uni Eropa. Selain itu Inggris juga merupakan negara penyumbang iuran yang paling besar ketiga setelah negara

Jerman kemudian Perancis. Total iuran yang telah dikeluarkan oleh Inggris telah berjumlah 145 miliar Euro atau 2.168 triliun rupiah pada tahun 2015, dengan kata lain iuran berupa 12,57% yang harus di bayarkan oleh Inggris tahun 2020 berjumlah 18,2 miliar Euro atau Rp. 272 triliun.

Uni Eropa juga mempunyai kebijakan lain di luar ekonomi. Uni Eropa telah menetapkan dirinya sebagai “payung” untuk imigran-imigran dan akan memberikan perlindungan kepada mereka seperti berdasarkan dari *Charter of Fundamental Rights European Union*, dan kewajiban internasional yang berasal dari hasil Konvensi Jenewa tentang status pengungsi tahun 1951. Dengan kebijakan pengungsi “*Open Door Policy*” yang diterapkan oleh organisasi tersebut, mewajibkan seluruh negara anggota Uni Eropa untuk menerima semua imigran yang ingin masuk ke wilayah Uni Eropa dan tidak diizinkan untuk memulangkan mereka di situasi bagaimana pun sebelum mereka memproses keinginan para imigran tersebut. Kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa ini dijalankan oleh seluruh negara anggotanya dan melalui *Common European Asylum System (CEAS)* menjadi sebagai supervisor dalam mengawasi apakah implementasi Konvensi 1951 yang dilakukan oleh negara anggota dilaksanakan dengan baik dan menjadi sebuah pintu kebaikan bersama untuk imigran yang mencari perlindungan di Eropa.

Pada tahun 2008 Uni Eropa membentuk kebijakan migrasi untuk area Eropa yang diberi nama *Strengthening the Global Approach to Migration* yang juga merupakan bagian dari *A Common Immigration Policy for Europe* serta *The Pact On Immigration and Asylum*. Kebijakan ini dibentuk oleh Presiden Nicolas Sarkozy dari Prancis dan kemudian diadopsi oleh Dewan Menteri di bulan

Oktober tahun 2008. Kebijakan ini dibuat untuk mengatur lima isu yang akan diprioritaskan, yaitu:

1. Mengatur imigrasi legal yang akan diproses penerimaan mereka di suatu negara eropa akan diatur dengan sejajar bersama kebutuhan atau kemampuan setiap negara - negara anggota Uni Eropa yang akan menerima imigran tersebut
2. Mengurus masalah imigran ilegal yang masuk ke negara kawasan Uni Eropa. Para imigran ilegal yang tertangkap akan dikembalikan ke negara asal mereka melalui program *Return Directives*. Isu ini ditegaskan bukan hanya untuk mencegah imigran ilegal masuk tetapi juga untuk meningkatkan kerjasama di antara negara negara anggota Uni Eropa untuk mencegah adanya perdagangan manusia atau human trafficking
3. Peningkatan keamanan di perbatasan yang diurus oleh frontex
4. Pembuatan badan suaka Eropa
5. Melakukan pendekatan kerjasama dengan negara negara di dunia ketiga yang menjadi asal datangnya para imigran

Uni Eropa dalam membuat kebijakan mewajibkan seluruh negara anggotanya untuk menetapkan kebijakan kebijakan tersebut di negara mereka. Keputusan ini telah menjadi hal yang sering dikritik oleh beberapa anggotanya, termasuk Inggris. Dengan kewajiban penggunaan kebijakan tersebut dikritik bahwa mereka memaksa mengatur kebijakan kebijakan negara Inggris. Hal ini justru memberikan beberapa kerugian terhadap negara tersebut. Seperti contoh adalah kebijakan *Open Door Policy* yang dimuat di TFEU (*Treaty on the Functioning of The European Union*), *Lisbon Treaty* (2009) dari Uni Eropa di

mana setiap negara diwajibkan untuk menerima imigran dari Uni Eropa dan menjamin kebebasan mereka untuk bergerak di wilayah negara anggota UE. Kebijakan ini menyebabkan meningkatnya Jumlah imigran yang berasal dari wilayah UE untuk masuk ke Inggris (Ivanna Kottasova, 2016). Dengan jumlah pengungsi yang muncul dan mulai menyebar ke dalam masyarakat akan menimbulkan sedikit konflik diantaranya. Tidak sedikit imigran imigran yang telah diterima oleh pemerintah dikucilkan dan dicela oleh masyarakat. Selain itu dengan banyaknya jumlah imigran tersebut juga berarti harus bisa pemerintah memberikan mereka hak hak mereka seperti mendapatkan pekerjaan. Namun bagaimana pun tidak akan mudah dalam memberikan mereka semua pekerjaan, terutama dengan skill skill yang berbeda akan mempersulit dalam pemberian pekerjaan. Selain itu, Uni Eropa juga menetapkan kebijakan visa Schengen. Visa Schengen merupakan visa yang memberikan izin imigran untuk melakukan kunjungan dengan batasan waktu hingga 90 hari. Kebijakan ini membawa kerugian untuk di bidang keamanan, dikarenakan kebijakan ini dapat mempermudah masuknya imigran ke suatu negara dan dapat meningkatkan resiko kriminilitas (BBC, 2016 ).

Pada tahun 2020 lalu Inggris telah resmi keluar dari Uni Eropa (Brexit). Hal ini menandakan kebebasan dari segala kebebasan kebijakan kebijakan Uni Eropa dan dapat kembali membentuk regulasi mereka sendiri tanpa ada halangan. Dengan keluarnya Inggris menandakan mereka tidak lagi harus menggunakan kebijakan open door. Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris mengajukan kebijakan point based system sebagai kebijakan imigrasi mereka dan di tahun 2021 kebijakan ini diterapkan. Kebijakan Point Based System merupakan

kebijakan yang menetapkan pemenuhan poin untuk imigran yang ingin masuk ke Inggris (GOV.UK, 2020). Kebijakan ini diterapkan dengan tujuan membentuk kebijakan yang tidak berpatut pada asal usul suatu imigran melainkan dari skill dan keterampilan imigran tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana Inggris memutuskan untuk merubah kebijakan imigrasi mereka dari *Open Door Policy* menjadi kebijakan *Point Based System* tahun 2021-2023 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan imigrasi baru yang akan ditetapkan setelah Inggris keluar dari Uni Eropa.
2. Untuk mencari tahu apa yang menjadi alasan untuk pemerintah Inggris untuk meninggalkan kebijakan lama yang telah dipegang mereka dan memilih untuk mengubah kebijakan imigrasi mereka ke kebijakan baru

## **1.4 Cakupan penelitian**

Penelitian akan membahas tentang bagaimana kebijakan point based system diterapkan oleh pemerintah Inggris sebagai kebijakan imigrasi mereka. Untuk dapat meneliti kebijakan imigrasi baru ini, cakupan waktu yang akan dipakai untuk penelitian ini adalah dari tahun 2016 yang merupakan awal referendum Brexit di keluarkan sampai tahun 2023. Kebijakan point based system sangat menarik untuk diteliti karena kebijakan juga digunakan oleh Australia yang juga menjadi salah satu negara penerima imigran terbanyak.

## 1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari penelitian - penelitian lainnya yang telah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan sebagai kajian. Hasil hasil dari penelitian tersebut akan dijadikan perbandingan untuk mencari lebih dalam dari topik penelitian yaitu tentang bagaimana Inggris mengadopsi kebijakan imigrasi baru pasca Brexit dan dampaknya terhadap imigran pra Brexit. Selain itu penelitian ini akan meneliti bagaimana Inggris mengubah kebijakan imigrasi Open Door Policy menjadi kebijakan Point Based System setelah Brexit.

Melalui hasil penelitian dari Fidya Faridah Kultsum dan Erlina Wiyanarti (2018) di mana mereka melakukan penelitian yang berfokus sejarah Inggris dan Uni Eropa dan dinamisasi di antara 2 pihak tersebut dari awal sampai terjadinya Brexit. Inggris yang pada awalnya mengalami beberapa hambatan untuk masuk ke dalam Uni Eropa. Dimana mereka akan mendapat keuntungan yang sangat besar dengan keanggotaan tersebut. Namun pada akhirnya, semua kewajiban kewajiban serta peraturan yang telah ditentukan Uni Eropa telah mendorong Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. Dengan penelitian ini memberikan isu dimana dengan keluarnya Inggris Uni Eropa tentunya merupakan keputusan yang akan memberikan tantangan baru kepada mereka dalam menghadapi situasi baru itu.

Dengan keputusan Inggris untuk keluar dari Inggris (Brexit) melalui penelitian dari Yovita Francisca, Nanik Trihastuti dan Kholis Roisah (2017) yang membahas tentang bagaimana implikasi referendum Brexit terhadap kebijakan kebijakan Inggris terutama di bagian kebijakan Imigrasi. Dimana dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa berarti Inggris sudah tidak lagi terikat dari peraturan Uni Eropa dan tidak lagi berkewajiban untuk mengikuti kebijakan kebijakan Uni Eropa. Inggris telah berhak untuk menetapkan kebijakan imigrasi

mereka sendiri tanpa campur tangan pihak lain lagi (Yovita Francisca, Nanik Trihastuti dan Kholis Roisah. 2017). Namun keputusan Brexit ini jelas akan memberikan dampak serta tantangan baru yang harus dilalui oleh Inggris dalam membentuk kebijakan Imigrasi mereka setelah lepasnya dari Uni Eropa.

Setelah sejarah Inggris dan Uni Eropa, melalui penelitian dari David Goodhart (2018) yang membahas tentang imigrasi setelah Brexit. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana Inggris akan beradaptasi dengan kondisi negara mereka setelah keluar dari Uni Eropa dan meng spekulasi bagaimana kebijakan imigrasi Inggris pasca Brexit akan berbentuk. Dimana dalam penelitian tersebut mencoba untuk menjelaskan berbagai bidang dari kebijakan imigrasi tersebut, seperti ketentuan untuk mendapatkan status kewarganegaraan untuk para imigran, sistem pemberian izin untuk bekerja kepada mereka yang telah mendapatkan status kewarganegaraan mereka, serta hak hak sosial mereka seperti hak untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan dan fasilitas edukasi dan hak hak lain yang dimiliki oleh HAM setiap orang. Melalui artikel penelitian ini akan memberikan poin poin penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah Inggris dalam membentuk kebijakan imigrasi mereka sendiri pasca Brexit

Melalui penelitian dari Vella Putri Octavia (2021) dimana penelitian tersebut fokus untuk membahas kebijakan imigrasi Inggris pasca Brexit melalui studi kasus krisis bahan bakar di Inggris. Dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa menandakan lepasnya Inggris dari *Free Movement of People* dari Uni Eropa yang memaksakan setiap anggotanya untuk menerima setiap imigran yang masuk secara legal kedalam negara mereka. Penelitian ini menyajikan bagaimana Inggris yang telah membentuk kebijakan dan sistem mereka sendiri dalam



menanggapi Imigran yang telah masuk. Selain itu penelitian ini juga berfokus kepada bagaimana dampak dari kebijakan tersebut terhadap Inggris tersebut dan menjelaskannya melalui studi kasus tersebut. Penelitian oleh Vella Putri Octavia telah memiliki banyak poin penting yang dapat mendukung penelitian ini.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori Policy Cycle yang diterapkan oleh Laswell (1956). Laswell berpendapat bahwa dalam tahap pembentukan kebijakan dipengaruhi oleh kontribusi dan interaksi dari berbagai aktor individu atau kelompok yang termasuk dalam pembentukan kebijakan tersebut. Dengan begitu dalam proses pembentukan kebijakan tersebut akan terlepas dari bias politik. Laswell berpendapat bahwa proses pembentukan kebijakan terbentuk dalam model *cyclical* yang diawali dengan mengedepankan masalah dan menjadikannya perhatian publik, selanjutnya kebijakan untuk masalah tersebut dibentuk, dipilih dan kemudian diimplementasikan; dan, kebijakan yang telah diimplementasikan evaluasi kembali dan apabila dinilai kurang efektif, maka kembali ke tahap pertama. Model ini menggambarkan sebuah lingkaran dimana input dan output dari suatu pembentukan kebijakan yang mengarah ke kelanjutan proses pembuatan kebijakan yang akan terus berjalan.

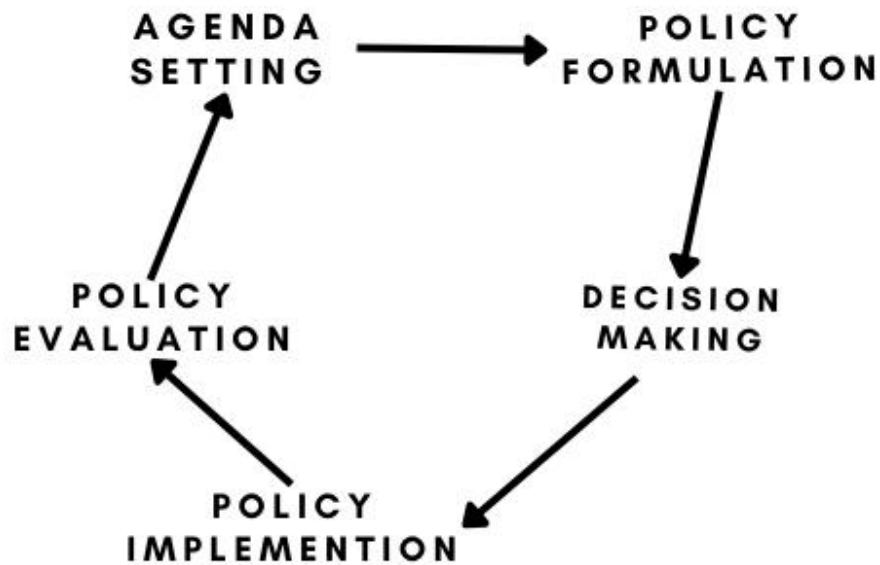
Dalam tahap pembentukan kebijakan, Laswell menetapkan 5 tahap yang harus dilakukan oleh pembentuk kebijakan tersebut, yaitu:

1. Agenda Setting, tahap di mana masalah yang ada diidentifikasi dan dijadikan agenda yang akan butuh untuk dibicarakan. Agenda yang diletakkan biasanya merupakan daftar masalah atau topik yang pejabat pemerintah dan pihak-pihak yang berhubungan

dengan pemerintah perhatikan dengan serius (kingdom 1995, 3).  
Topik atau masalah yang biasanya dijadikan agenda adalah topik yang sedang difokuskan oleh publik/media.

2. Policy Formulation, merupakan tahap untuk menaksir dan mengidentifikasi segala solusi atau pilihan yang ada untuk menanggapi kebijakan yang bermasalah tersebut.
3. Decision Making, tahap untuk dimana solusi dan pilihan yang telah disampaikan pada tahap sebelumnya dipilih.
4. Policy Implementation, tahap dimana kebijakan yang dipilih kemudian diimplementasikan. Adanya bukti jelas bahwa pemerintah telah menggerakkan sumber daya untuk menjalankan kebijakan baru tersebut.
5. Policy evaluation, tahap dimana kebijakan tersebut di evaluasi, apakah kebijakan tersebut dapat dinilai berhasil atau tidak dan apa saja efek yang dibawa dari kebijakan tersebut. Apabila dianggap tidak membawa efek positif, maka proses kembali ke tahap 1 lagi.

**Gambar 1. Tahap Pembentukan Kebijakan Menurut Teori Policy Cycle**



Sumber: Public Policy Cycle (Laswell, 1957) 2

### **1.7 Argumen Sementara**

Dalam penelitian ini, teori Laswell mengenai policy cycle menjelaskan bahwa proses pembentukan kebijakan dilakukan melalui 5 tahap yaitu, Agenda Setting dimana isu imigran yang menjadi fokus utama media Inggris dikarenakan kebebasan mereka untuk masuk ke dalam Inggris dan membawa kerugian baik untuk pemerintah maupun masyarakat Inggris. Di tahap Policy Formulation yaitu dengan Menteri Dalam Negari Amber Rudd yang menugaskan MAC untuk membuat laporan tentang imigrasi dari UE untuk dapat membentuk dasar rancangan sistem imigrasi baru pasca Brexit di tahun 2021. Selanjutnya pada tahap Decision Making, pemerintahan Theresa May menerima rekomendasi yang telah diberikan oleh MAC, dan di pemerintahan Boris Johnson, kebijakan imigrasi baru berdasarkan rekomendasi tersebut dipilih. Di tahap Policy Implementation

pada saat Inggris akhirnya menetapkan kebijakan Point Based System yang telah di formulasikan pada tahun 2021. Terakhir untuk tahap policy Evaluation, evaluasi telah dilakukan dari *stakeholders* yang menerima beberapa perubahan tersebut tetapi juga memiliki kekhawatiran sendiri sedangkan hasil apakah berhasil, disini mengurangi jumlah imigran, masih belum dapat terlihat jelas dikarenakan efek pandemic Covid-19 yang memaksa Negara menutup perbatasan mereka. Maka dari itu, argument sementara dari penulis tentang bagaimana Inggris mengubah kebijakan imigrasi Open Door menjadi Point Based System di tahun 2016-2023 dapat diaplikasi melalui teori Policy cycle yang diterapkan oleh Laswell.

## **1.8 Metode Penelitian**

### *1.8.1 Jenis Penelitian*

Penelitian yang akan dilakukan berjenis penelitian kualitatif. Dimana dalam penelitian ini akan berusaha untuk memahami bagaimana kebijakan imigran baru yang ditetapkan oleh Inggris dan alasan mengapa Inggris memilih untuk merubah kebijakan imigrasi mereka.

### *1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Inggris yang menjadi pembentuk kebijakan imigrasi baru setelah Brexit dimana melihat bagaimana kebijakan imigrasi baru mereka akan menjadi sumber data penelitian ini. Objek dari penelitian adalah para kebijakan *point based system*, dimana sebagai sistem imigrasi yang akan diterapkan oleh pemerintah Inggris.

### 1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui studi pustaka. Di mana dengan mengumpulkan buku, artikel serta Jurnal yang berkaitan dengan topik untuk membantu dalam melaksanakan penelitian ini.

### 1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian akan dilakukan dengan diawali pengumpulan data-data yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Kemudian menganalisis bagaimana data tersebut berpengaruh terhadap subjek penelitian dan menyusun hasil data tersebut sesuai dengan rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian.

## 1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian akan di sistematika menjadi empat bab yang berkaitan satu sama lain. Sebelum masuk ke bab pertama akan diawali dengan halaman sampul, kemudian dilanjutkan dengan daftar isi dan halaman pernyataan keaslian. Masuk ke bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari sembilan sub bab; latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, Argumen Sementara, metode penelitian ( jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data dan proses penelitian) dan sistematika pembahasan. Kemudian bab dua berisi pembahasan dan hasil penelitian yang akan memberikan gambaran umum tentang hal hal yang menjadi alasan Inggris mengubah kebijakan imigrasi mereka menjadi kebijakan *point based system*. Bab tiga akan berisi penerapan teori yang telah dipilih untuk meneliti lebih dalam lagi kenapa Inggris memilih untuk menggunakan Kebijakan

*point based system*. Bab ke 4 akan berisi kesimpulan dari penelitian. Dan akan diakhiri dengan halaman daftar pustaka.

## BAB II

### KEBIJAKAN IMIGRASI INGGRIS SEBELUM DAN SESUDAH BREXIT

#### 2.1 Kebijakan Imigrasi Open Door Inggris Masa Pra Brexit

Kebijakan open door merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa sebagai kebijakan Imigrasi negara negara Anggota. Secara mendasar, kebijakan open door adalah suatu kebijakan yang dibentuk untuk menerima imigran masuk. Uni Eropa menetapkan kebijakan Open Door Policy sebagai kebijakan negara anggota mereka untuk menekan jumlah imigran yang dimana tingkat krisis pengungsi yang semakin bertambah, Uni Eropa juga menetapkan suatu model kebijakan yang disebut sebagai *Common European Asylum* atau CEAS yang menjelaskan mengenai penanganan terhadap para pengungsi dan imigran. Model kebijakan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap pengungsi sesuai dengan yang tertera di hukum internasional. Kebijakan open door sendiri merupakan kebijakan dimana negara membuka perbatasan negara mereka untuk semua imigran tanpa adanya keperluan untuk proses pendeteksian maupun pemindaian terhadap imigran tersebut. Kebijakan open door yang ditetapkan oleh Uni Eropa tersebut dijalankan oleh semua negara Anggota Eropa dan melalui CEAS, kebijakan tersebut menjadi sebuah supervisor dalam mengawasi apakah Konvensi 1951 telah diimplementasikan dengan baik oleh negara anggota Uni Eropa dan menjadi sebuah pintu kebaikan bersama untuk imigran yang ingin masuk ke dalam Eropa dan mendapatkan perlindungan di negara anggotanya.

Kebijakan open door menjadi kebijakan Inggris untuk kebijakan imigrasi mereka pra brexit. Kewajiban open door ini mewajibkan Inggris untuk membuka lebar gerbang keamanan perbatasan Inggris untuk dilalui oleh para imigran sehingga menyebabkan imigran tersebut dapat dengan bebasnya masuk ke dalam negara Inggris. Uni Eropa menetapkan kebijakan ini didasari oleh alasan kemanusiaan serta demi kepentingan bersama untuk dalam organisasi Uni Eropa sendiri. Kebijakan ini mengakibatkan hilangnya kontrol Inggris terhadap perbatasan mereka sendiri dan menyebabkan meningkatnya arus imigran yang masuk ke dalam Inggris secara signifikan.

Imigran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi bidang ekonomi serta fiskal Inggris. Inggris memiliki regulasi dimana setiap imigran yang masuk ke dalam Inggris wajib untuk membayar pajak khusus. Pada tahun 2011 Inggris memiliki pendapatan sebesar 20 miliar poundsterling dari imigran yang berasal dari wilayah Uni Eropa dan mendapat sekitar 5 miliar poundsterling dari imigran yang bukan dari wilayah Uni Eropa. Namun disisi lain masyarakat lokal Inggris merasa bahwa pendapatan dari imigran ini tidak sebanding dengan kerugian yang mereka rasakan dengan besarnya jumlah imigran yang ada. Permasalahan yang muncul di berbagai bidang seperti ekonomi, layanan kesehatan, keamanan dan masalah perumahan.

Dalam bidang ekonomi, pendapatan yang didapat dari pajak khusus imigran ini dianggap tidak dapat menutupi kerugian yang diterima oleh masyarakat lokal Inggris dikarenakan besarnya jumlah imigran yang telah diterima. Dengan besarnya jumlah imigran yang masuk dianggap mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal Inggris sendiri. Inggris merupakan



negara industrial, namun dengan besar jumlah imigran yang masuk memperkecil jumlah lapangan kerja dikarenakan imigran yang masuk kedalam negara Inggris berjumlah besar dan juga berasal dari berbagai belahan negara di dunia. Besarnya jumlah imigran ini menjadi salah satu alasan mayoritas suara yang menginginkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, selain itu dikarenakan juga imigran itu utamanya yang berasal dari negara-negara di kawasan Eropa Timur yang juga merupakan anggota Uni Eropa (Michael, 2016).

Selain dari bidang ekonomi Inggris juga memandang bahwa masalah yang muncul oleh besarnya jumlah imigran juga berdampak di bidang keamanan domestik Inggris. Kasus-kasus kekerasan yang berhubungan dengan imigran meningkat seiring dengan jumlah imigran yang masuk. Beberapa contoh kekerasan seperti pemukulan, pencabulan, penusukan dan sampai kepada pembunuhan. Menurut media informasi di Inggris yaitu The Sun melalui Freedom of Information, dalam selang waktu 2015-2016 hampir sekitar 900 orang imigran yang masuk telah melakukan tindakan kriminal. Tindakan-tindakan kriminal yang tercatat seperti pencabulan, adanya ancaman pembunuhan, kekerasan terhadap anak di bawah umur dan lansia dll. (Hamilton, 2016). Tindakan-tindakan kriminal ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya kesulitan untuk imigran dalam berbaur dengan masyarakat lokal Inggris yang biasanya karena dikucilkan oleh masyarakat lokal sampai adanya rasisme dari masyarakat lokal dan karena kesulitan bagi imigran dalam memenuhi kebutuhan mereka dikarenakan belum mendapatkan pekerjaan atau belum mendapatkan pekerjaan yang tetap.

Berikutnya yang menjadi masalah yang muncul karena masuknya imigran adalah masalah tempat tinggal atau rumah. Dengan besarnya jumlah imigran yang masuk karena kebijakan open door policy ini menyulitkan pemerintah Inggris dalam memberikan tempat tinggal atau akomodasi yang layak untuk para imigran tersebut baik itu untuk imigran yang masuk secara legal atau yang masuk secara ilegal. Meski pun di tahun 2019 - 2020 penyelesaian masalah tempat tinggal dan akomodasi telah meningkat secara bertahap, pemerintah Inggris masih belum bisa menyelesaikan secara utuh masalah ini dan masalah tersebut menjadi lebih akut setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah imigran di Inggris di sisi lain dapat meningkatkan jumlah tunawisma di kota atau bahkan negara. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki modal yang cukup atau pekerjaan yang dapat mencukupi untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Selain itu, para penyewa rumah, pemilik kontrakan atau tuan rumah yang menetapkan biaya sewa, kontrak atau jual yang sangat tinggi untuk imigran imigran gelap. Hal seperti ini menyebabkan munculnya rumah-rumah “gelap” di kota kota Inggris. Sejak tahun 2013 jumlah imigran yang terpaksa tinggal di rumah rumah “gelap” tersebut daripada menjadi tunawisma terus meningkat. Kondisi untuk rumah rumah “gelap” sangat buruk dan kurang layak untuk ditinggali seperti lantai rumah yang masih sebatas beton, kondisi atap yang sebagian besar belum layak atau tidak ada sama sekali, dinding dinding di rumah yang berlubang atau belum ada sama sekali dan harus ditutup menggunakan kain atau sprei. Selain itu rumah rumah “gelap” ini biasanya merupakan bekas lokasi kasus kasus kotor (Kompas,2013).

Terlepas dari masalah ekonomi, keamanan serta tempat tinggal, besarnya jumlah imigran yang masuk juga memunculkan masalah publik, masalah ini

terkait dengan kebijakan publik tentang National Health Security (NHS) atau Layanan Kesehatan Nasional serta pelayanan pendidikan. Pemerintah Inggris dinilai tidak dapat menyediakan pelayanan publik yang cukup dalam menangani respon dan dinilai terlalu lambat dalam merespon peningkatan permintaan masyarakat. Meningkatnya jumlah imigran yang masuk membuat alokasi dana untuk pembiayaan pelayanan publik meningkat. Beban penghematan mengalami penurunan drastis yang disebabkan oleh pemotongan kesejahteraan dan belanja sosial lainnya. Masalah ini terus meningkat setiap tahunnya. Manfaat yang didapat dari pajak dari aliran imigrasi ke pemerintah pusat yang lambat dalam mengimbangi organisasi seperti National Health Service (NHS) maupun pihak otoritas pendidikan setempat menyebabkan adanya tambahan untuk biaya penyediaan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh imigran tersebut (Ipsos Mori, 2017).

Dengan adanya permasalahan permasalahan dari berbagai bidang beserta dengan perilaku imigran yang keras dan dinilai cenderung ke tindakan kriminal dan ditambah juga dengan biaya serta pengorbanan lebih besar lagi terhadap imigran membuat pemerintah Inggris mengajukan referendum Brexit. Dengan besarnya kerugian yang didapat oleh pemerintah serta masyarakat lokal Inggris mereka memilih untuk keluar dari Uni Eropa untuk mendapatkan kembali kontrol perbatasan mereka.

## **2.2 Kebijakan Pemerintah Inggris Terhadap Isu Imigran Pasca Brexit**

Uni Eropa yang menetapkan diri sebagai payung untuk imigran. Pernyataan ini didukung dengan kebijakan kebijakan yang mereka terapkan dinilai sangat mendukung masuknya Imigran dengan bebas ke setiap negara

anggotanya. Dimana hal ini menjadi pendorong keinginan masyarakat dan pemerintah Inggris untuk mengadakan Referendum supaya Inggris dapat keluar dari Uni Eropa dan mendapat kebebasan membentuk kebijakan mereka sendiri.

David Cameron mundur dari jabatannya sebagai perdana menteri dan kemudian diambil oleh Theresa May sebagai perdana menteri baru untuk Inggris. Dengan diadakannya Referendum Brexit, Theresa beserta kabinetnya mulai berusaha untuk mencari solusi untuk masalah yang ada karena kebijakan Uni Eropa. Perdana Menteri Theresa May sebagai ketua partai konservatif di Inggris menyatakan bahwa ia merasa optimis bisa mempertahankan kejayaan Inggris walaupun Inggris telah mengundurkan diri dari Uni Eropa (Sudaryono,2016).

Pemerintah Inggris berniat untuk merancang kebijakan untuk mengganti kebijakan *Free movement person* atau yang juga disebut sebagai *Open Door Immigration Policy* yang dimana kebijakan ini membuka adanya pergerakan bebas secara tetap. Menteri Brexit, David Davis, mengajukan saran untuk menetapkan batas waktu untuk imigran yang berasal dari Uni Eropa untuk kembali ke negara asal mereka, dan setelah mereka keluar, mereka tidak akan lagi diizinkan untuk dapat tinggal menetap di Inggris pasca Brexit.

Namun Inggris belum bisa menerapkan kebijakan imigrasi mereka sendiri. Hal ini dikarenakan Inggris hanya akan tercatat secara resmi telah meninggalkan Uni Eropa setelah mereka menyelesaikan segala kewajiban yang harus sudah selesai pada tahun 2019. Melalui ketentuan tentang proses keluarnya suatu anggota dari Uni Eropa yang diatur dalam Traktat Lisbon, berdasarkan pasal 50 Traktat Lisbon tertulis bahwa apabila suatu negara anggota ingin keluar dari keanggotaannya, maka mereka wajib untuk memberikan notifikasi kepada Dewan

Uni Eropa dan juga memberikan syarat atas pengunduran diri mereka. Setelah pengajuan kemunduran dalam selang waktu 2 tahun negosiasi berakhir, setelah itu hak dan kewajiban negara tersebut sebagai anggota Uni Eropa telah berakhir (BBC, 2019). Dengan kata lain, dalam implikasi untuk pelaksanaan prosedur pengunduran Inggris dari Uni Eropa mereka harus menunggu selama 2 tahun. Setelah itu Inggris baru dinyatakan telah secara resmi telah mengundurkan diri dari Uni Eropa. Selama waktu 2 tahun mereka menunggu, mereka masih akan menggunakan kebijakan yang sama dengan kebijakan Uni Eropa.

Karena ketentuan yang membuat Inggris belum bisa sepenuhnya lepas dari Uni Eropa dan masih harus menggunakan kebijakan dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Kondisi ini menyebabkan keberadaan imigran di Inggris pasca referendum Brexit masih belum bisa dikontrol dengan baik. Akibatnya adanya peningkatan jumlah imigran yang masuk Inggris pasca referendum brexit di tahun 2018 yang lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2016 yang tercatat berjumlah sekitar 67.141 juta imigran (Fitra Agung, 2021). Peningkatan jumlah imigran disebabkan oleh keinginan imigran untuk masuk ke Inggris sebelum Inggris dapat mengubah kebijakan imigrasi mereka.

Setelah Inggris resmi keluar perdana menteri Theresa May telah membuat rancangan pemerintah yang ingin menggunakan kebijakan imigrasi yang mirip dengan yang digunakan oleh pemerintah Australia yaitu kebijakan imigrasi Point Based System. Namun kebijakan ini masih hanya sebatas wacana yang belum diresmikan oleh pemerintah Inggris sampai Inggris dapat menyelesaikan kewajiban kewajibannya di tahun 2019.

### 2.3 Kebijakan Imigrasi Point Based System Inggris Pasca Brexit

Selama 2 tahun Inggris yang masih harus mengikuti kebijakan dan peraturan Uni Eropa, Inggris merancang kebijakan baru untuk mengganti kebijakan Uni Eropa. Inggris membentuk rancangan undang-undang untuk mengakhiri hukum dari Uni Eropa sesuai yang ada dalam EEA (*European Economic Area*) 1972. Kemudian undang-undang tersebut dinegosiasikan antara Uni Eropa dan Inggris yang termasuk kebijakan mengenai ekonomi, imigrasi topik-topik lainnya. Yang kemudian akan memperbaiki kontrol Inggris terhadap perbatasannya dan mengakhiri adanya *Free Movement of Person* lagi di Inggris.

Setelah Inggris resmi keluar dari Uni Eropa, Inggris mulai memasuki era baru dimana perdana menteri Theresa May yang menjabat sebelumnya digantikan oleh Boris Johnson yang menyatakan bahwa “Sekarang Inggris sudah bebas untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dan bila perlu akan lebih baik daripada Uni Eropa”. Inggris yang telah terlepas dari segala kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh Uni Eropa kemudian menetapkan perubahan dalam aturan keluar masuk baik untuk imigran maupun warga negara Inggris yaitu:

- a. Segala bentuk pergerakan bebas untuk warga negara Inggris serta warga negara-negara anggota Uni Eropa telah berakhir, dan akan digantikan dengan sistem imigrasi berbasis poin (*Point Based System*) di Inggris.
- b. Untuk warga negara Inggris yang ingin tinggal di negara-negara di wilayah Uni Eropa selama lebih dari 90 hari dalam jangka waktu 180 hari, maka mereka harus mempunyai visa

- c. Bagi warga negara wilayah Uni Eropa yang ingin pindah atau tinggal di Inggris (terkecuali Irlandia), maka mereka akan dihadapkan dengan sistem berbasis poin (*Point Based System*) yang sama dengan warga negara lain di dunia.

Konsep kebijakan Point Based System sendiri bukanlah merupakan suatu konsep yang asing bagi Inggris sendiri. Kebijakan Point based System merupakan kebijakan yang diadopsi dari kebijakan imigrasi negara Australia. Dimana Australia yang juga menjadi salah satu negara yang banyak didatangi oleh imigran menetapkan kebijakan Point Based System untuk mengatur arus imigran yang masuk dan juga untuk mempermudah imigran pekerja berterampil untuk masuk dan mendapatkan pekerjaan sesuai keterampilan. Selain itu Inggris juga pernah menggunakan Point Based System untuk menanggapi saat Inggris terjerumus ke dalam resesi global. Pada masa itu Inggris telah menerima pekerja yang lahir di luar Inggris untuk memenuhi banyaknya lowongan kerja yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat lokal sebelum Inggris terjerumus ke dalam resesi global. Hal ini mengakibatkan meningkatnya persentase imigrasi ke Inggris pada 2008 sampai 13 persen. Untuk menanggapi kritik dari media dan masyarakat terhadap tingginya persentase migrasi ekonomi, pemerintah Inggris memperkenalkan konsep Point Based System pada tahun 2008. Konsep Point Based System diperkenalkan untuk memfilter pekerja terampil dari pekerja lainnya.

Kebijakan Point Based System yang telah direncanakan oleh pemerintah Inggris akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020, yang merupakan sistem yang diadopsi dari kebijakan Imigrasi Australia. Mulai dari berlakunya kebijakan Point Based System ini, seluruh warga negara yang berasal dari negara negara

wilayah Uni Eropa dan warga negara yang bukan berasal dari wilayah Uni Eropa akan diperlakukan dengan setara. Perubahan perubahan yang akan terjadi akan diikuti dengan penjelasan lebih jelas untuk membantu kelancaran penerapan sistem baru dan memastikan imigran yang ingin masuk ke dalam Inggris mengetahui syarat yang harus dipenuhi dan juga akan memberikan waktu yang cukup untuk semua orang beradaptasi dengan sistem baru tersebut.

### 2.3.1. *Batasan Gaji dan Skill*

Komite Penasihat Migrasi atau *Migration Advisory Committee* (MAC) mengumpulkan laporan tentang batas gaji dalam sistem berbasis point yang dikeluarkan di tanggal 28 Januari. Melalui rekomendasi yang diberikan oleh *Migration Advisory Committee* tentang ambang batas gaji untuk imigran, menyarankan untuk menurunkan ambang batas gaji umum dari 30.000 Euro ke 25.600 Euro. Namun dalam penggunaan Point Based System, pekerja dapat menukarkan beberapa hal untuk mendapatkan gaji lebih tinggi seperti spesifik tawaran pekerjaan mereka. Seluruh Imigran harus dibayar lebih tinggi dari ambang batas gaji mereka berdasarkan spesifikasi pekerjaan yang mereka miliki, yang disebut juga sebagai 'going rate'.

*Migration Advisory Committee* juga memberikan rekomendasi untuk menurunkan batas minimal level skill RQF ( Regulated Qualification Framework) dari RQF 6 menjadi RQF 3. Akan dihilangkan juga pembatasan jumlah imigran yang dapat masuk melalui jalur pekerja terampil dan akan dihapus juga tes pasar tenaga kerja. Perubahan perubahan yang direkomendasikan oleh *Migration Advisory Committee* dibuat untuk memastikan bahwa Inggris dapat menerima



lebih banyak pekerja terampil dari seluruh dunia dan proses masuknya para pekerja terampil tersebut akan menjadi lebih sederhana dan cepat.

### 2.3.2 Jalur Masuk Pekerja Terampil

Kebijakan Point Based System akan menjadi kebijakan yang memberikan prosedur yang efektif, fleksibel serta sederhana untuk para kelompok pekerja terampil yang datang dari seluruh dunia ke dalam Inggris melalui sistem *employer-led*. Untuk semua pekerja terampil yang ingin masuk ke Inggris, untuk warga negara wilayah Uni Eropa dan yang bukan berasal dari Uni Eropa wajib menunjukkan bukti bahwa mereka telah mendapat tawaran pekerjaan dari sponsor atau perusahaan di Inggris yang telah disetujui dan telah dicek bahwa tawaran pekerjaan yang telah diterima sesuai dengan tingkat keterampilan yang telah disyaratkan. Selain itu, para pekerja terampil harus dapat berbahasa Inggris. Untuk seorang imigran masuk ke Inggris melalui jalur pekerja terampil mereka harus mendapat pekerjaan yang bergaji sekitar 25,600 Euro atau lebih. Namun, apabila gaji mereka kurang dari jumlah yang ditentukan tapi tidak kurang dari 20,480 Euro, pelamar kerja masih dapat diterima apabila mereka:

- Mendapat tawaran pekerjaan yang memiliki kekurangan pekerja
- Memiliki gelar PhD yang berhubungan dengan pekerjaan
- Memiliki gelar PhD untuk mata pelajaran STEM ( Science, Technologies, Engineering and Mathematician) yang berhubungan dengan tawaran pekerjaan

Selain mendapatkan tawaran dan keahlian berbahasa Inggris, pelamar pekerjaan harus mendapatkan 70 poin yang didapatkan dengan memenuhi atau memiliki beberapa hal, yaitu:

**Table 1. Karakteristik dan Poin Yang Harus Dipenuhi Oleh Imigran Untuk Mendapatkan Visa Melalui *Point Based System***

karakteristik	wajib/tambahan	poin
Tawaran pekerjaan dari sponsor yang disetujui atau diakui	wajib	20
Pekerjaan dengan level keterampilan yang sesuai	wajib	20
Ahli dalam berbahasa Inggris	wajib	10
Gaji pekerjaan di antara 20,480 Euro sampai 23,039 Euro	tambahan	0
Gaji pekerjaan di antara 23,040 Euro sampai 25,599 Euro	tambahan	10
Gaji pekerjaan lebih dari 25,600 Euro	tambahan	20
Mendapat pekerjaan yang memiliki kekurangan pekerja yang ditentukan oleh <i>Migration Advisory Committee</i> (MAC)	tambahan	20
Kualifikasi pendidikan: gelar PhD yang berhubungan dengan pekerjaan	tambahan	10
Kualifikasi pendidikan: gelar PhD di mata pelajaran STEM yang berhubungan dengan pekerjaan	tambahan	20

Sumber: GOV.UK (2022)

### 2.3.3 Jalur Masuk Pelajar

Jalur masuk untuk pelajar juga disediakan oleh pemerintah untuk pelajar yang ingin masuk dan yang masih ingin belajar di Inggris. Pelajar harus mendaftar untuk mendapatkan Visa Pelajar. Sama seperti jalur pekerja terampil tidak ada perbedaan dalam prosedur pembuatan Visa Pelajar untuk pelajar yang berasal dari negara di wilayah Uni Eropa dengan pelajar yang bukan berasal dari negara di wilayah Uni Eropa. Setiap pelajar yang wajib untuk memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan Visa Pelajar, yaitu:

- Pelajar harus telah menerima tawaran untuk belajar di salah satu institusi pendidikan yang diakui oleh pemerintah Inggris

- Pelajar harus telah memiliki bukti telah diterima untuk belajar di salah satu institusi pendidikan yang diakui oleh pemerintah Inggris
- Pelajar harus memiliki kualifikasi akademik yang berhubungan yang dibutuhkan untuk mengambil kursus dan benar benar ingin belajar di Inggris
- Pelajar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi mereka sendiri selama mereka belajar di Inggris

Selain persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya, pelajar juga harus memenuhi batas minimal poin yang ditetapkan untuk mendapatkan Visa Pelajar mereka. Pelajar harus mendapatkan minimal 70 point, yaitu:

- 50 poin: menerima bukti penerimaan mereka di salah satu Institusi Akademis yang diakui pemerintah Inggris
- 10 poin: pelajar dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka
- 10 poin: pelajar dapat menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris di tingkat B2 (IELTS skor minimal 5,5 di bidang berbicara, menulis dan membaca) seperti yang diterapkan oleh *Common European Framework of Reference for Languages*

Untuk pelajar yang telah berada di Inggris sebelum adanya perubahan kebijakan harus mengikuti beberapa peraturan supaya dapat memperbarui Visa pelajar mereka, beberapa hal yang harus disiapkan oleh yaitu:

- Mempersiapkan segala hal untuk memperbarui Visa Pelajar mereka paling lambat 8 minggu sebelum Visa pelajar yang dimiliki kadaluarsa

- Menyerahkan ke institusi akademik yang pelajar tetapkan dengan fotokopi paspor, Biometrik Izin Tinggal dan sertifikat *Academic Technology Approval Scheme* (ATAS) apabila dimiliki oleh pelajar
- Selalu menginformasikan rincian kontak dengan Institusi Akademik yang pelajar tetapi
- Memberikan kembali bukti bahwa pelajar tidak memiliki masalah finansial atau dapat memenuhi kebutuhan finansial mereka selagi melanjutkan pelajaran di Inggris

#### 2.3.4 Jalur Masuk Lainnya

Untuk imigran yang ingin masuk bukan sebagai pelajar atau pekerja terampil memiliki sistem yang berbeda. Untuk Imigran yang ingin masuk dengan alasan seperti; mengunjungi keluarga dan pencari suaka belum menggunakan sistem Point based. Untuk warga negara wilayah Uni Eropa akan dianggap sebagai warga negara non-visa, dengan kata lain warga negara wilayah Uni Eropa dapat masuk ke Inggris sebagai Pengunjung atau turis tanpa perlu mendapatkan visa selama 6 bulan. Selain itu, Inggris juga tidak membentuk jalur sendiri untuk pekerja pekerja wiraswasta. Dikarenakan beberapa profesi menyebabkan pekerja untuk bekerja sebagai freelance. Pemerintah Inggris juga membentuk peraturan yang mengizinkan artis, penghibur, dan pemusik untuk tetap tampil di suatu acara dan untuk mengikuti kompetisi dan audisi di Inggris sampai 6 bulan. Para artis, penghibur dan pemusik juga dapat mendapat bayaran untuk acara dan kompetisi tersebut sampai sebulan untuk beberapa acara atau kompetisi tanpa perlunya Visa Kerja atau tanpa mendapat sponsorship formal. Hal ini ditetapkan oleh pemerintah Inggris karena, Inggris telah menjadi negara yang menarik untuk dikunjungi oleh

artis tingkat dunia, sehingga artis artis tersebut dapat dengan mudah masuk Ke Inggris.

#### **2.4 Masa Transisi Kebijakan Imigran Inggris Pasca Brexit Tahun 2021**

Referendum Brexit membawa salah satu dampak yang diinginkan oleh Pemerintah Inggris, yaitu kebebasan untuk menentukan kebijakan Imigrasi baru mereka. Setelah lebih dari empat puluh tahun Inggris menjadi Anggota Uni Eropa, Inggris akhirnya mengundurkan diri dari Uni Eropa. Selama masih menjadi anggota, pemerintah Inggris mengevaluasi masalah yang muncul akibat kebijakan open door yang diterapkan sebelumnya di berbagai bidang. Maka dari itu, Dimulai dari tanggal 1 Januari 2021 telah berakhirnya *Freedom of movement* untuk imigran yang berasal dari Uni Eropa yang ingin untuk tinggal atau bekerja tanpa adanya pengajuan visa. Dengan penetapan kebijakan Point Based System, Inggris berharap dapat mengendalikan arus masuk Imigran ke dalam negaranya.

Pemerintah Inggris memperkenalkan sistem Point Based untuk dapat mengendalikan arus imigrasi mereka baik untuk imigran yang masuk maupun keluar dari Inggris dan memberlakukan sistem visa baru. Namun banyak pergerakan yang terhambat pada awal sistem kebijakan Point Based System yang disebabkan oleh Covid-19, seluruh negara di dunia menetapkan lockdown. Pemerintah Inggris menetapkan peraturan Imigrasi baru yang berlaku dari tanggal 1 Januari 2021. Dimana semua warga negara wilayah Uni Eropa yang tinggal di Inggris sebelum tanggal 1 Januari 2021 wajib untuk mengajukan pembuatan visa kerja dan bagi yang gagal untuk mengajukan visa kerja sampai tanggal 30 Juni 2021 akan dianggap oleh pemerintah Inggris sebagai orang yang melebihi masa tinggal mereka dan akan dipulangkan ke negara asal mereka, namun apabila

mereka dapat memberikan alasan yang dapat diterima atau valid maka mereka akan diberikan waktu tambahan untuk mengajukan visa kerja mereka. Namun, dikarenakan Covid-19 dan negara Inggris yang juga menetapkan situasi lockdown untuk negaranya, para pekerja yang gagal untuk mengajukan visa kerja tidak dapat dipulangkan ke negara asal mereka dan memperlambat integrasi Inggris dengan kebijakan Imigrasi baru mereka serta menghambat proses observasi pemerintah terhadap kebijakan imigrasi baru tersebut.

Secara keseluruhan , adanya penerapan kebijakan imigrasi baru tentu akan memunculkan kesempatan untuk berbagai pihak dalam proses integrasi kebijakan tersebut. Di satu sisi perubahan kebijakan imigrasi yang terjadi, mendorong masyarakat lokal dengan membatasi jumlah imigran yang masuk dan dapat memberikan kesempatan untuk masyarakat lokal untuk berkembang. Sedangkan untuk para imigran juga mendapatkan kesempatan lebih untuk mendapatkan status permanen untuk seluruh imigran seperti izin untuk menetap. Para imigran juga akan dapat memegang hak hak yang sama dengan yang dipegang oleh masyarakat lokal dengan beberapa pengecualian seperti, tidak berhak untuk bervoting, mencalonkan diri, atau beberapa pekerjaan yang memiliki batasan nasionalitas (seperti pegawai sipil). Selain kesempatan, kebijakan imigrasi baru tersebut juga mencoba untuk mengurangi kemungkinan imigran dieksploitasi, menurut penelitian yang telah ada sebelumnya, imigran yang memiliki daya tawar yang kurang atau terbatas memiliki risiko yang lebih besar untuk dieksploitasi oleh pemberi kerja mereka (McKay et al, 2009; Bloch, 2013). Dengan kebijakan imigrasi baru ini memastikan imigran yang masuk memiliki keterampilan yang luas atau mencukupi untuk lapangan kerja mereka dan sistem imigrasi ini juga

mengharuskan untuk imigran yang masuk diterapkan dalam “lingkungan yang kurang bersahabat” seperti di situasi dimana mereka harus dapat membuktikan hak dan keterampilan mereka untuk bekerja.

Secara umum, sistem imigrasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah Inggris diperkirakan akan relatif mahal dan memakan cukup banyak waktu. Dengan dikeluarkannya sistem Biaya Keterampilan Imigrasi bersamaan dengan adanya Biaya Tambahan Kesehatan Imigrasi, biaya untuk imigran mengajukan permohonan imigrasi meningkat sekitar empat kali lipat antara tahun 2014 sampai 2018, dan selama 2018 sampai 2021 juga terus meningkat. Mulai dari bulan Februari 2022 Inggris akan menghapus adanya tawaran pengurangan biaya untuk warga negara Uni Eropa. Pasca Brexit Inggris juga mengalami kekurangan dalam ukuran pasar tenaga kerja mereka dengan cukup besar. Pemerintah Inggris sadar bahwa mereka masih belum bisa menghasilkan pekerja yang berketerampilan, khususnya di bidang sains, teknik dan matematika yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka industri di Inggris yang terus berkembang. Dengan ketergantungan mereka terhadap imigran pekerja, Inggris menghapus adanya batasan tahunan jumlah pekerja terampil dan juga menghapus tes pasar tenaga kerja penduduk dari kebijakan Point Based System. Pemerintah Inggris juga memutuskan untuk melonggarkan persyaratan dalam kebijakan Point Based System yang baru dipasang untuk dapat memberikan kesempatan untuk Imigran yang bekerja di bidang ICT ( Information, Communication and Technologies) untuk masuk ke dalam jalur pekerja terampil. Hal ini membantu para imigran yang bekerja di bidang ICT untuk dapat mendapat status menetap di Inggris, dimana sebelumnya sulit didapat walaupun sudah bekerja di Inggris untuk

beberapa tahun. Pemerintah Inggris memutuskan untuk mengecualikan syarat keterampilan berbahasa Inggris untuk para imigran yang bekerja di bidang ICT untuk memasuki jalur Pekerja Terampil.

Inggris memang telah mengadopsi kebijakan Point Based System sebagai kebijakan imigrasi mereka. Namun, bisa dilihat bahwa Inggris masih harus terus beradaptasi dengan kondisi mereka dan terus menyesuaikan kebijakan Point Based System baru ini untuk dapat memperbaiki kondisi mereka dari masa Pra Brexit dan dari akibat Pasca Brexit sendiri. Sehingga kedepannya besar kemungkinan kebijakan imigrasi baru ini akan terus diperbarui.



## **BAB III**

### **ANALISIS MENGAPA INGGRIS MEMUTUSKAN UNTUK MERUBAH KEBIJAKAN IMIGRASI MEREKA DARI *OPEN DOOR POLICY* MENJADI KEBIJAKAN *POINT BASED SYSTEM* DI TAHUN 2016-2023 MENGUNAKAN TEORI *POLICY CYCLE***

#### **3.1 Agenda Setting**

Agenda Setting merupakan tahap pertama dalam penerapan teori policy cycle. Agenda setting merupakan suatu proses dimana sebuah fenomena sosial atau suatu situasi telah diakui serta dianggap telah berubah menjadi suatu masalah publik dan tidak lagi dipengaruhi dengan efek sosial maupun alam, atau telah menjadi bagian dari lingkungan privat, sehingga masalah publik tersebut menjadi subjek utama dalam suatu perdebatan dan dibahas dalam kontroversi di media serta politik (Garraud, 2004). Tahap agenda Setting adalah tahap yang sangat krusial dalam tahap policy cycle, hal ini dikarenakan dinamika suatu negara akan memberikan dampak yang dapat menentukan bagaimana seluruh proses sebuah kebijakan yang akan dibentuk serta kebijakan yang dipilih untuk dibentuk (Lemieux, 2002; Howlett dan Ramesh, 2003). Agenda Setting berfokus kepada berbagai faktor faktor yang dapat menjelaskan mengapa suatu keputusan mengenai pembuatan kebijakan diambil. Agenda setting merupakan suatu proses konstruksi sosial (Howlett dan Ramesh, 2003), dimana suatu keputusan dalam pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai bidang seperti kondisi alam, sosial, ideologi dll.

Kebijakan open door yang ditetapkan oleh Uni Eropa telah memberikan beberapa kerugian bagi Inggris karena terbuka dengan luasnya gerbang perbatasan imigrasi negara Inggris. Kebijakan yang ditetapkan oleh Uni Eropa dibuat dengan alasan kemanusiaan dan perlindungan terhadap imigran. Selama kebijakan open door masih berlaku di Inggris, imigran dapat masuk ke dalam wilayah negara Inggris dengan bebas. Kebebasan ini memberikan rasa lepas kendali untuk Inggris terhadap perbatasan mereka sendiri. Data imigrasi untuk imigran masuk ke Inggris pada tahun 2015 telah dihitung sekitar 630,000, melebihi jumlah yang keluar dari Inggris lebih dari dua kali lipat (CNN, 2016) .

Kedatangan imigran memang dapat memberikan keuntungan bagi negara Inggris. Imigran yang masuk memang harus membayar pajak khusus yang dapat mendorong perekonomian Inggris. Namun dengan banyaknya jumlah imigran yang masuk, pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Inggris untuk para imigran tersebut tidak dapat ditutupi oleh pajak khusus imigran tersebut. Di sisi lain, masyarakat lokal Inggris juga merasa dampak besarnya jumlah imigran yang masuk ke Inggris. Dengan penyebaran imigran di Inggris menyebabkan banyak dampak secara langsung terhadap masyarakat dan lingkungan mereka. Salah satu dampak untuk masyarakat dari penyebaran imigran menyebabkan mengecilkan jumlah lapangan pekerjaan. Inggris yang merupakan negara Industri membuka lapangan pekerjaan yang dimana kompetisi antara masyarakat lokal dan imigran yang masuk tanpa adanya kontrol yang ketat menyebabkan berkurangnya kesempatan masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan tersebut.

Di sisi lain masyarakat Inggris juga merasakan dampak kedatangan imigran dengan jumlah besar di bidang keamanan. Dimana dengan menyebar

luasnya imigran imigran yang masuk ke dalam negara meningkatkan besarnya kemungkinan kejahatan terjadi. Jumlah kasus kasus kekerasan yang disebabkan atau ada hubungan dengan imigran juga meningkat bersamaan dengan meningkatnya jumlah imigran yang masuk ke Inggris. Kekerasan kekerasan terjadi bisa dalam berbagai bentuk seperti pemukulan, pencabulan, penusukan dan yang terburuk berupa pembunuhan. Masyarakat lokal Inggris merasa tidak aman di lingkungan tempat tinggal mereka sendiri dengan tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Media informasi The Sun Through Freedom of Information juga mengemukakan kekhawatiran masyarakat, dimana mereka menginformasikan bahwa dalam selang waktu 2015-2016 telah tercatat bahwa hampir sekitar 900 orang Imigran yang masuk ke Inggris telah melakukan tindakan kriminal. Beberapa tindakan kriminal yang telah tercatat adalah tindakan pencabulan, memberikan ancaman pembunuhan, melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur maupun Lansia dst. (Hamilton, 2016). Selain itu masalah keamanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal terhadap imigran juga merupakan masalah untuk pemerintah Inggris. Tidak sedikit imigran yang masuk kedalam suatu lingkungan tidak dapat berbaur dengan baik bersama masyarakat lokal. Hal ini biasanya disebabkan masyarakat lokal mengucilkan para imigran yang masuk yang biasanya disebabkan oleh rasa rasisme dan apabila terus berlangsung dapat berkembang menjadi tindakan kriminal.. Walaupun Pemerintah Inggris telah membentuk *Home Office* untuk menjadi pemberi bantuan dan perlindungan untuk imigran yang menjadi korban dalam situasi seperti ini tanpa adanya hubungan dengan statis imigran mereka, melalui sebuah program yang berfokus untuk menanyakan 45 cabang kepolisian di Inggris, menjelaskan bahwa dari 45 cabang

kepolisian yang ditanya apakah mereka mengarahkan imigran yang dalam kondisi yang sama kepada *Home Office* untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan, 27 cabang menjawab “iya” dengan jawaban bervariasi dari selalu, tidak sering, atau langka, 3 cabang menjadi “tidak” dan sisanya tidak memberikan jawaban yang jelas atau menjawab bahwa mereka tidak memiliki datanya (BBC UK, 2018). Program ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bahwa banyaknya imigran yang tidak mendapat bantuan dan perlindungan disebabkan oleh kurangnya kerja sama pihak polisi dengan pihak *Home Office* dalam memberikan bantuan dan perlindungan.

Penyediaan tempat tinggal juga menjadi isu yang muncul dari besarnya jumlah imigran yang masuk. Dimana pemerintah Inggris harus bisa menyediakan lahan atau bangunan untuk di tinggali oleh para imigran yang masuk. masalah rumah “gelap” untuk para imigran gelap juga menjadi sorotan oleh media. Para pemilik atau penyewa rumah yang menetapkan harga untuk kontrak atau jual yang sangat tinggi untuk dibayar oleh imigran gelap. Dengan kondisi rumah rumah “gelap” yang dinilai sangat buruk dan kurang layak untuk dihuni menimbulkan daerah kumuh yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat (Kompas, 2013).

Melihat isu isu yang terus bermunculan, doktrin politik *Eurosceptism* terhadap terhadap keanggotaan Inggris di Uni eropa berkembang di masyarakat Inggris dan partai konservatif. Dengan media yang sering berfokus kepada isu isu yang berhubungan dengan imigran, memunculkan konsep Brexit yang menandakan keinginan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa. David Cameron sebagai perdana menteri Inggris dan pemimpin partai konservatif pada tahun 2016 menyelenggarakan voting untuk menentukan keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

Dengan hasil voting yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat Inggris Ingin keluar dari Uni Eropa dan media publik yang terus menggambarkan isu isu imigran akibat dari kebijakan imigrasi Uni Eropa. Inggris memilih keluar dari Uni Eropa dan berkomitmen untuk mengubah kebijakan imigrasi mereka untuk menanggapi isu isu imigran tersebut.

### **3.2 Policy Formulation**

Setelah Agenda Setting atau isu isu telah diakui dan perlu untuk ditangani (Howlett dan Ramesh, 2003), maka masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap policy formulation. Tahap ini membahas tentang proses mengidentifikasi dan menaksir segala bentuk solusi yang dapat digunakan suatu pihak dalam menyelesaikan kebijakan yang bermasalah saat itu, dengan melihat pada pro dan kontra serta menentukan yang solusi mana yang bisa untuk digunakan dan yang solusi yang kurang cocok akan ditolak (Howlett dan Ramesh, 2003). Dalam tahap formulasi kendala prosedural juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi banyak aspek, dimana aspek tersebut berbasis kepada kelembagaan dalam prosedur pemerintahan, atau secara taktis, berdasarkan kepada hubungan di antara berbagai pihak atau aktor dan kelompok sosial. Aktor serta kelompok sosial adalah bagian komponen dari sebuah subsistem dan keterpaduan antara aktor dan kelompok sosial yang berhubungan dengan wacana yang dibahas serta ikatan sosial diantara mereka memberikan pengaruh yang mendasar dalam proses formulasi kebijakan. Apabila di antara aktor dan kelompok tercipta suatu kohesi yang ada antara wacana dalam suatu subsistem kebijakan, maka akan besar kemungkinan adanya penolakan terhadap kebijakan yang baru di formulasikan, dan sebaliknya apabila subsistem tersebut memiliki struktur yang kurang kohesi dan terbuka untuk aktor

aktor baru menyampaikan ide ide mereka akan membentuk ruang yang memberikan peluang inovasi baru yang baik (Howlett dan Ramesh, 2003, 156-157). Dengan kata lain hubungan antara pemerintah dengan aktor aktor sosial yang baik dan terbuka menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana proses formulasi suatu kebijakan publik.

Setelah keluarnya referendum Brexit, Inggris telah menyatakan keinginan untuk keluar dari Uni eropa. Dengan referendum ini perdana menteri David Cameron turun karena telah gagal mempertahankan Inggris di Uni Eropa dan digantikan oleh Theresa May untuk menyelesaikan referendum Brexit. Untuk menanggapi masalah migrasi, pemerintah konservatif mulai membentuk sistem visa pekerja dan pelajar untuk seluruh imigran dari mana pun mereka berasal. Pada bulan Juli 2017, menteri dalam negeri Amber Rudd menugaskan MAC untuk membuat laporan tentang imigrasi dari UE serta tentang “peran imigran dalam ekonomi dan lembaga yang lebih luas” yang akan digunakan sebagai konsep dasar kebijakan imigrasi baru yang akan digunakan setelah masa transisi Brexit berakhir pada tahun 2021.

Hasil laporan yang diberikan oleh MAC telah memberikan beberapa rekomendasi konsep yang dapat dipakai untuk kebijakan imigrasi Inggris kedepannya, yaitu:

- Sistem imigrasi yang mempermudah imigran berketerampilan tinggi untuk masuk ke dalam Inggris.
- Tidak memberikan hak khusus warga UE untuk bermigrasi ke dalam Inggris.

- Penghapusan kuota tahun untuk pekerja dengan izin kerja tingkat 2 (umum).
- Memberikan izin untuk pemberi pekerja untuk memberikan pekerjaan kepada pekerja asing untuk pekerjaan yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi.

Pemerintahan May mengeluarkan *white paper* pada bulan desember 2018 yang berjudul *The UK's future skills-based immigration system*. Menteri dalam negeri, Sajid Javid menjelaskan bahwa *white paper* tersebut menjelaskan 3 titik penting untuk kebijakan imigrasi inggris setelah Brexit, yaitu:

- Berakhirnya *free movement* untuk warga UE di Inggris.
- Tidak adanya hak khusus untuk warga UE.
- Imigran yang memiliki keterampilan yang di butuhkan akan diberikan prioritas.

*White paper* yang dikeluarkan mengikuti rekomendasi yang telah diberikan MAC melalui laporan mereka. *White paper* setuju akan beberapa hal yang direkomendasikan seperti penurunan level keterampilan yang dibutuhkan untuk peran sponsor serta tidak adanya pernyataan tentang visa permanen untuk pekerja dengan keterampilan rendah. Namun proposal ini dinilai akan menyusahkan bisnis yang bergantung dengan imigran UE, seperti pekerja bangunan dll. Akhirnya proposal ini tidak dapat diterapkan.

Pada tanggal 24 Juli 2019 Boris Johnson naik menjadi Perdana Menteri menggantikan Theresa May. Johnson menyatakan bahwa ia akan membentuk kebijakan imigrasi yang berdasarkan dari *white paper* yang dikeluarkan oleh pemerintahan May di tahun 2018. Boris johnson menyatakan bahwa ia

menginginkan kebijakan imigrasi yang mirip dengan kebijakan Point Based System Australia. Partai Konservatif meminta MAC untuk meninjau kebijakan imigrasi tersebut. Partai Konservatif juga mengeluarkan manifesto yang akan memperkenalkan sistem imigrasi point based yang lebih ketat dan adil. Manifesto yang dikeluarkan secara garis besar berisi sebagai berikut:

- Mengakhiri *free movement* yang ada dan pemberian penanganan yang sama untuk imigran dari mana saja
- Pengurangan imigran pekerja berketerampilan rendah
- Memberikan prioritas untuk yang berbicara bahasa Inggris, orang yang memegang pendidikan bagus dan kualifikasi dan taat hukum
- Imigran yang ingin masuk ke Inggris butuh tawaran kerja
- Pengurangan jumlah imigran

### **3.3 Decision Making**

Tahap ketiga yang dilalui adalah tahap Decision Making. Pada tahap sebelumnya telah membahas tentang bagaimana solusi untuk masalah atau isu disampaikan. Di mana solusi atau kebijakan yang diajukan untuk menghadapi isu tersebut dipilih untuk diimplementasikan. Proses Decision Making bukan hanya sebatas eksplorasi rasional terhadap pilihan pilihan yang telah disediakan. Sebaliknya, tahap ini merupakan proses tawar menawar yang dilakukan oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan permasalahan yang berhubungan dengan proses Decision Making tersebut demi memajukan agenda tersebut (Kenis & Schneider, 1991). Selain adanya keinginan memajukan agenda dan kepentingan yang berbeda setiap pihak, proses ini juga membahas mengenai penentuan masalah atau isu dan solusi yang dapat digunakan untuk menghadapi masalah



tersebut diusulkan. Hal ini biasanya dapat mencakup hal seperti kendala anggaran dan kendala kapabilitas (Jann & Wegrich, 2006).

Topik kebijakan imigrasi baru Inggris setelah Brexit berakhir telah menjadi topik yang terus dibahas di dalam *House of Commons*. Perdana Menteri Theresa May telah membentuk *white paper* yang berisi rekomendasi kebijakan imigrasi Inggris setelah Brexit berakhir dan Perdana Menteri Boris Johnson telah menyampaikan pendapatnya tentang membentuk sistem imigrasi Point Based System Australia yang lebih ketat dan adil. Manifesto yang dikeluarkan oleh pemerintahan Boris Johnson telah disampaikan oleh Ratu Elizabeth II melalui *Queen's Speech* yang menyatakan bahwa Inggris akan memanfaatkan fenomena Brexit untuk dapat mengambil kembali kendali perbatasan mereka, uang mereka serta hukum mereka dan membentuk sistem imigrasi Point Based System yang baru untuk Inggris ke depannya.

Kebijakan imigrasi Point Based System di debatkan di *House of Lords* pada tanggal 25 Februari 2020. Dalam Debat tersebut Baroness Williams of Trafford sebagai juru bicara menjelaskan bahwa penetapan kebijakan Point Based System akan mengakhiri *free movement* di Inggris dan akan mempermudah imigran berketerampilan tinggi untuk masuk ke Inggris. Selama debat berjalan, anggota *House of Lords* menyampaikan pertanyaan, kritik serta rekomendasi mereka terhadap rencana kebijakan imigrasi tersebut, seperti:

1. Meminta MAC untuk terus mereview berjalannya kebijakan imigrasi baru ini dan dapat memberikan saran kepada pemerintah.
2. Kesulitan bidang kepedulian sosial untuk berkembang dengan sistem visa yang ketat.

3. Memberikan prioritas untuk imigran yang memiliki keterampilan di bidang sains dan teknologi, mengingat Inggris merupakan negara industri
4. Membentuk jalur masuk untuk pekerja wiraswasta (artis, penyanyi, pelukis dll.).
5. Mempermudah jalur masuk untuk imigran yang ingin masuk dengan kondisi tertentu ( melakukan pekerja amal, bisnis dan investasi dll).

Pada bulan Mei tahun 2020, *House of Commons* Inggris melakukan pengambilan suara terhadap rancangan undang undang mengenai kebijakan Point Based System sebagai kebijakan imigrasi Inggris. Pengambilan suara memberikan hasil 351 suara setuju dan 252 suara tidak setuju. Menteri Dalam Negeri Priti Patel berkata bahwa: “ rancangan undang undang ini akan menjadi bagian penting dalam mengakhiri adanya *free movement* dan membentuk jalur untuk penggunaan Point Based System sebagai kebijakan imigrasi Inggris”(TheGuardian, 2020). Pembentukan rancangan kebijakan lainnya juga dilakukan oleh Inggris setelah referendum Brexit, dilakukan dengan membentuk kebijakan “*two steps immigration*” yaitu pembentukan visa *short term* serta *permanent resident* (Government, 2019). Syarat syarat yang ditetapkan untuk pengajuan *permanent resident*, yaitu:

1. Skill Assessment, di mana harus adanya assessment skill untuk para imigran yang ingin memasukkan izin menjadi *permanent resident* dan untuk mengetahui apakah skill dan pekerjaan yang mereka miliki termasuk dalam Daftar SOL ( *Skill Occupation List*)
2. Visa Sementara Lulusan, di mana untuk pelajar imigran yang telah menyelesaikan program belajar mereka di jurusan yang terdaftar

dalam SOL. maka para pelajar tersebut dapat mengajukan Visa Sementara Lulusan

3. Kemampuan Berbahasa Inggris, penetapan kemampuan berbahasa Inggris sebagai syarat untuk mengajukan permohonan *Permanent Resident*. Seluruh imigran yang ingin mengajukan permohonan *Permanent Resident* harus memiliki skor minimal 5.5 di semua bidang.
4. Penetapan Aturan Point Based System, penetapan syarat untuk pemenuhan poin oleh pemohon untuk mendapat hak memiliki status *Permanent Resident*.
5. Ketentuan Medis dan Karakter, pembentukan tes yang wajib untuk diikuti oleh pemohon *Permanent Resident* yang diantaranya merupakan tes kesehatan serta karakter.

Rancangan undang undang kebijakan imigrasi Point Based System pada hari rabu, tanggal 11 November tahun 2020 telah menerima *Royal Assent* (tanda tangan ratu). *Royal Assent* tersebut menandakan akan berakhirnya *free movement* pada tanggal 31 Desember 2020. manifesto yang dikeluarkan oleh pemerintahan Boris Johnson telah diterima dan dimasukkan ke dalam hukum Inggris dan menandakan untuk pertama kali setelah penetapan Open Door oleh UE, Inggris dapat kembali memilih siapa yang masuk ke dalam Inggris, berdasarkan kemampuan yang mereka miliki dan bukan dari mana imigran tersebut berasal (GOV.UK, 2020).

### 3.4 Policy Implementation

Tahap keempat dalam policy cycle adalah tahap implementasi, atau proses dimana kebijakan yang telah dipilih diterapkan. Ini adalah tahap di mana keputusan yang telah diambil, dilaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah dan dihadapkan dengan kenyataan (Mégie, 2004). Tahap ini memberikan gambaran tentang apa yang terjadi antara pemerintah yang berniat untuk bertindak dan efek dari tindakan tersebut. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dapat memberikan solusi yang jelas serta detail untuk diinterpretasikan, adanya alokasi sumber daya yang jelas ke mana dan kewenangan delegasi yang jelas dalam pengambilan keputusan (Jann & Wegrich, 2006)

. Sesuai dengan hasil voting yang dilakukan oleh anggota *House of Commons* dan dengan rancangan undang undang kebijakan imigrasi Point Based System yang telah melalui *Royal Assent*, kebijakan imigrasi Point Based System akan mulai berlaku di Inggris bersama dengan berakhirnya transisi Brexit pada tanggal 31 Desember 2020. Dengan berlakunya kebijakan Point Based System menandakan berakhirnya *free movement* di Inggris. Penerapan sistem visa yang ketat dan dengan adanya pemenuhan poin diharapkan dapat mengontrol dan mengurangi jumlah imigran yang masuk. Inggris akan mulai memberikan prosedur yang sama untuk imigran yang ingin mendapatkan visa di Inggris dari manapun asal mereka. Pemerintah Inggris juga akan mengubah sistem pembuatan mereka menjadi sepenuhnya daring dengan pembentukan eVisa. Pembuatan jadwal batas untuk imigran yang berasal dari wilayah UE untuk mengurus izin menetap mereka di Inggris menandakan sudah tidak ada lagi hak khusus yang diberikan kepada mereka.

Penetapan jalur pekerja dibentuk untuk pekerja yang terampil. Melalui jalur pekerja terampil, Imigran yang memiliki tawaran pekerja dengan keterampilan dan gelar yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Bersama dengan jalur pekerja terampil, jalur untuk pekerja di bidang kesehatan juga disediakan untuk mempermudah dokter, perawat dan pekerja lain di bidang yang sama terutama setelah pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh negara. Selain itu, jalur *Global Talent* juga dibuat untuk memberikan prioritas kepada individual yang memiliki keterampilan di bidang STEM dan bidang seni (film, arsitektur, film dll.). Jalur *Global Talent* di perkenalkan untuk dapat mendorong inovasi dan teknologi di Inggris

Selain jalur pekerja, pemerintah Inggris juga membentuk jalur untuk pelajar yang ingin belajar di Inggris. Untuk pelajar yang Ingin belajar di Inggris harus dapat memenuhi poin yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan benar benar ingin belajar di Inggris. Pemerintah juga membuat sistem visa sendiri untuk pelajar di bawah umur yang ingin belajar di sekolah mandiri Inggris. Jalur lulusan juga dibentuk untuk mempermudah pelajar yang telah lulus di Inggris untuk tetap tinggal dan mencari pekerjaan/ bekerja sampai maksimal 3 tahun. Setelah pelajar menyelesaikan 3 tahun jalur lulusan mereka akan dapat mengikuti jalur pekerja terampil bila mereka sudah mendapatkan tawaran pekerjaan dari sponsor dan dapat kembali memenuhi poin yang telah diterapkan.

Penetapan rute yang tidak membutuhkan pemenuhan poin juga dibentuk oleh pemerintah Inggris. Rute ini dibentuk untuk pekerjaan sementara, membantu keturunan Inggris untuk dapat bekerja dan menetap kembali di Inggris. Rute rute yang dibentuk tanpa adanya pemenuhan poin adalah sebagai berikut:

**Table 2. Rute Tanpa Perlu Adanya Pemenuhan Poin Yang Dibuat Oleh Pemerintah Inggris**

Rute	Butuh Sponsor?	Bisa Menetap?
Pekerjaan sementara-pekerja amal	Ya	Tidak
Pekerjaan sementara-pekerja kreatif	Ya	Tidak
Pekerjaan sementara-penukaran pekerja dengan izin pemerintah	Ya	Tidak
Pekerjaan sementara-pekerja perjanjian internasional	Ya	Tidak
Pekerjaan sementara- pekerja religius	Ya	Tidak
Pekerjaan sementara-pekerja musiman	Ya	Tidak
Wakil dari bisnis luar negeri	Ya	Tidak
Pekerja rumah tangga di luar negeri	Ya	Tidak
Keturunan Inggris	Tidak	Ya
<i>Youth Mobility Scheme</i>	Tidak	Tidak
Pekerja perbatasan	Tidak	Tidak
Pelajar masa pendek	Tidak	Tidak

Sumber: Common Library analysis of UK Immigration Rules

Pemerintah Inggris juga dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan membentuk jalur untuk pekerjaan berketerampilan rendah atau bergaji rendah. Untuk pekerjaan yang diisi oleh pekerja berketerampilan rendah, pemerintah menyatakan bahwa masih banyak pekerja imigran yang memenuhi syarat untuk bekerja yang telah masuk sebelum Brexit dan melalui program *Youth Mobility Scheme* yang terus membawa pekerja dari usia 18-30 dari berbagai nasionalitas.

### 3.5 Policy Evaluation

Tahap kelima dari *policy cycle* di mana kebijakan yang telah diimplementasi, dievaluasi dan monitor bagaimana efek dan dampak dari kebijakan tersebut. Kegiatan pembentukan kebijakan dilakukan untuk menyelesaikan atau menanggapi suatu masalah yang ada. Tahap ini akan berfokus kepada dampak yang tidak disengajakan (Jann & Wegrich, 2007). Apabila dalam tahap ini kebijakan yang telah dikeluarkan kurang efektif atau tidak sama sekali efektif dalam menyelesaikan masalah, maka proses pembentukan kebijakan akan kembali ke tahap Agenda Setting.

Pada tanggal 1 Januari 2021, Inggris telah menggunakan kebijakan imigrasi baru. Dengan perubahan ini, tentu akan menimbulkan dampak di berbagai sisi atau pihak. Melalui paper penelitian yang dikeluarkan oleh *House of Common* yang dibuat oleh Georgina Sturge, pada bulan Juni 2023 jumlah migrasi masuk Inggris berjumlah sekitar 1,180,000 orang dan sekitar 508,000 orang melakukan migrasi keluar Inggris. Data ini menunjukkan bahwa jumlah bersih migrasi ke dalam Inggris menurun dari periode sebelumnya di mana pada tahun 2022 berjumlah 1,23 juta. Namun, *Migration Observatory* dari Universitas Oxford menyatakan bahwa hasil ini masih relatif tinggi dibandingkan pada tahun 2019 saat Inggris dilanda pandemik COVID-19.

Reaksi dari *Stakeholders* juga diberikan terhadap keluarnya kebijakan imigrasi baru ini. *Stakeholders* menyatakan bahwa mereka menerima beberapa aspek dari kebijakan tersebut, namun menyampaikan beberapa kritik dan keraguan terhadap beberapa aspek, seperti:

- Efek yang akan dirasakan oleh pekerjaan yang membutuhkan banyak pekerjaan bergaji rendah yang dikhawatirkan akan membawa kerugian.

- Penetapan batasan gaji yang ditetapkan tanpa adanya variasi regional.
- Biaya yang harus ditanggung oleh pemberi pekerjaan untuk memberikan sponsor untuk imigran jalur pekerja terampil terutama untuk perusahaan yang relatif kecil.

Sayangnya evaluasi yang menyeluruh masih belum dapat dilakukan dengan dikarenakan kebijakan imigrasi masih dalam tahap transisi yang akan berjalan selama 4 tahun dan diperkirakan akan berakhir pada tahun 2025.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Referendum Brexit telah membawa perubahan yang besar untuk aktivitas perbatasan Inggris. Dengan banyaknya kerugian yang didapatkan Inggris selagi menjadi anggota Uni Eropa dan masih mengikuti kebijakan imigrasi Open Door yang ditetapkan. Isu-isu imigran yang muncul dikarenakan kebijakan Open Door menjadi prioritas di mata pemerintah Inggris. Dikarenakan kurangnya kontrol Inggris atas perbatasan mereka menandakan Free Movement dimana adanya kebebasan imigran untuk masuk dan keluar dari Inggris. Masalah imigran yang terus disorot oleh media menyebabkan keresahan di masyarakat Inggris. Kerugian ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat lokal Inggris dikarenakan besarnya jumlah imigran yang masuk yang menyebabkan kesulitan masyarakat lokal mendapatkan pekerjaan dikarenakan adanya persaingan tidak hanya dengan masyarakat lokal ada juga persaingan dengan besarnya jumlah imigran yang masuk dan adanya rasa kecemasan terhadap keamanan negara. Masyarakat Inggris mendorong pemerintah Inggris untuk mengakhiri keanggotaan Inggris di Uni Eropa dan mendapatkan kembali kontrol perbatasan mereka dan kebebasan membentuk kebijakan imigrasi mereka sendiri.

Inggris mengadakan referendum Brexit di tahun 2016 yang memberikan hasil dimana mayoritas masyarakat Inggris ingin Inggris keluar dari Uni Eropa.

Dengan hasil tersebut Inggris menyatakan bahwa mereka akan keluar dari Uni Eropa. Inggris yang ingin mengakhiri adanya Free Movement dibawah kepemimpinan Theresa May yang menjadi perdana menteri Inggris setelah dilaksanakan referendum Brexit. Membentuk kebijakan imigrasi yang diadopsi dari kebijakan imigrasi yang telah ditetapkan di Australia. Pada tanggal 1 Januari 2021 Inggris telah resmi mengubah kebijakan imigrasi mereka menjadi kebijakan Point Based System. Kebijakan imigrasi baru ini menjadi penanda berakhirnya Free Movement di Inggris. Besarnya jumlah imigran yang masuk ke Inggris menjadi prioritas masalah yang akan diselesaikan. Kebijakan Point Based memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh imigran untuk dapat mendapatkan visa di Inggris menjadi alat pengontrol arus imigran ke dalam Inggris. Pembentukan rute pekerja terampil dan kemampuan berbahasa Inggris menjadi syarat untuk mendapatkan visa di Inggris menandakan bahwa Inggris tidak lagi memberikan prioritas untuk imigran yang datang dari beberapa negara tertentu namun untuk imigran yang memiliki keterampilan tinggi dan dapat berbahasa Inggris. Pada tahun 2023 telah tercatat bahwa jumlah imigran yang masuk telah berkurang dari sekitar 1,23 juta menjadi 1,08 juta. Walaupun masih jauh tinggi dari tahun 2019 yang dikarenakan pandemik Covid-19, kebijakan ini untuk sementara dapat mengurangi jumlah imigran yang masuk.

#### **4.2 Rekomendasi**

Penelitian ini terbatas pada penerapan kebijakan *Point Based System* pada tahun 2021-2023. implementasi kebijakan tersebut merupakan bagian dari transformasi yang ditetapkan selama periode 4 tahun. Jika ada Penulis lain yang ingin meneliti lebih dalam lagi, dapat meneliti implementasi kebijakan ini di tahun

2025 setelah periode yang telah transformasi yang diterapkan oleh Pemerintah Inggris berakhir.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Applying for a Schengen visa.” n.d. Migration and Home Affairs. [https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/applying-schengen-visa\\_en](https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/applying-schengen-visa_en).
- Banha, Francisco, Adão Flores, and Luís Coelho. n.d. “A New Conceptual Framework and Approach to Decision Making in Public Policy.” *Knowledge* 2 (4): 539–56. <https://doi.org/10.3390/knowledge2040032>.
- Barrett, Susan. 2004. “Implementation Studies: Time for a Revival? Personal Reflections on 20 Years of Implementation Studies.” *Public Administration* 82 (2): 249–62. <https://doi.org/10.1111/j.0033-3298.2004.00393.x>.
- BBC News. 2016. “Schengen: Controversial EU free movement deal explained.” *BBC News*, April 24, 2016. <https://www.bbc.com/news/world-europe-13194723>.
- Birkland, Thomas A. 1997. “After Disaster: Agenda Setting, Public Policy, and Focusing Events.” *Choice (Chicago, Ill.)* 35 (08): 35–4778. <https://doi.org/10.5860/choice.35-4778>.
- Brian White, Richard Little, and Michael Smith. 1997. *Issues in World Politics*. Red Globe Pres.
- Cairney, Paul. 2019. *Understanding Public Policy: Theories and Issues*. Bloomsbury Publishing.
- Contact, corporateName=Commonwealth Parliament; Address=Parliament House Canberra, Act, 2600; n.d. “Immigration.”

[https://www.aph.gov.au/About\\_Parliament/Parliamentary\\_Departments/Parliamentary\\_Library/pubs/rp/BudgetReview202021/Immigration](https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/BudgetReview202021/Immigration).

David A, Rochefort, Howlett M, and Ramesh M. 2003. "Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems." *N.d*, May. <https://doi.org/10.2307/2952394>.

Dewa Gede Prastha Pratama Putra, Suksma Susanti, and Putu Ratih Kumala Dewi. 2020. "Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa Di Inggris." *DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL)*.

Dewi, Elisabeth. 2014. "Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia." *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*.  
<https://doi.org/10.26593/jihi.v9i1.535>.

Fischer, Frank, and Gerald J. Miller. 2017. *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods*. Routledge.

Francisca, Yovita, Nanik Trihastuti, and Kholis Roisah. 2017. "IMPLIKASI REFERENDUM BREXIT TERHADAP KEBIJAKAN IMIGRASI UNITED KINGDOM." *Diponegoro Law Journal* 6 (2): 1–18.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19638/18628>.

Garraud, Philippe. 2004. "Agenda Émergence." In *Presses de Sciences Po eBooks*, 49–56.  
<https://doi.org/10.3917/scpo.bouss.2010.01.0058>.

Georgina Sturge. 2022. "How Has Immigration Changed Under the UK's New 'Points Based' System?" House of Commons Library. September 28, 2022.  
<https://commonslibrary.parliament.uk/how-has-immigration-changed-under-the-uks-new-points-based-system/>.

Gideon, Skinner, and Amalia. n.d. "How Britain Voted in the 2017 Election."  
<https://www.ipsos.com/en-uk/how-britain-voted-2017-election>.

- Goodhart, David. 2018. "IMMIGRATION AFTER BREXIT." *A Policy Exchange Policy Bite*. <https://policyexchange.org.uk/wp-content/uploads/2018/01/Immigration-after-Brexit.pdf>.
- Government Digital Service. 2018. "Apply to the EU Settlement Scheme (Settled and Pre-settled Status)." GOV.UK. August 31, 2018. <https://www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families>.
- Hamilton, Michael. 2016. "Hundreds of Syrians in UK arrested over string of offences including rape and child abuse..." *The Sun*, July 31, 2016. <https://www.thesun.co.uk/news/1528756/hundreds-of-syrians-in-uk-arrested-over-string-of-offences-including-rape-and-child-abuse/>.
- HM Government. 2018. *The UK's Future Skills-based Immigration System (White Paper)*. APS Group. <https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-future-skills-based-immigration-system>.
- Howlett, Michael, and Kidjie Saguin. 2018. "Policy Capacity for Policy Integration: Implications for the Sustainable Development Goals." *Social Science Research Network*, January. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3157448>.
- "Immigration: Points-based System." n.d. *Parliament.UK*. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. <https://hansard.parliament.uk/Lords/2020-02-25/debates/D876BB2F-52CB-44EA-A2E7-DC4014D319EA/details>.
- Jann, Werner, and Kai Wegrich. 2017. "Theories of the Policy Cycle." In *Routledge eBooks*, 69–88. <https://doi.org/10.4324/9781315093192-12>.
- J.F, Savard. 2012. "POLICY CYCLE." *Encyclopedic Dictionary of Public Administration*, n.d.
- Kingdon, John W. 1995. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Longman.

- Kottasova, Ivana. 2016. "The facts about Brexit and immigration." *CNNMoney*, June 21, 2016. Accessed April 2, 2024.  
<https://money.cnn.com/2016/06/21/news/economy/brexit-eu-referendum-immigration-facts/>.
- Kultsum, Fidyah Faridah, and Erlina Wiyanarti. 2018. "DINAMIKA INGGRIS DAN UNI EROPA: INTEGRASI HINGGA BREXIT." *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah* 7 (2): 163–74. <https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15603>.
- Kurniawan, Evan. 2019. "KEBIJAKAN OPEN DOOR POLICY DI JERMAN TAHUN 2014-2019." <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/30876>.
- Latief. 2013. "Inggris Pusing dengan 'Rumah-rumah Gelap' Imigran." *KOMPAS.Com*, 2013.  
<https://properti.kompas.com/read/2013/12/19/1445031/Inggris.Pusing.dengan.Rumah-rumah.Gelap.Imigran>.
- Latorre, Will Somerville Will Somerville Dhananjayan Sriskandarajah, Maria. 2010. "United Kingdom: A Reluctant Country of Immigration." *Migrationpolicy.Org*. 2010. <https://www.migrationpolicy.org/article/united-kingdom-reluctant-country-immigration>.
- Lemieux, Vincent. 2002. *L'étude Des Politiques Publiques: les acteurs et leur pouvoir*. Presses Université Laval.
- McKinney, Cj, Georgina Sturge, and Melanie Gower. 2022. "The UK's new points-based immigration system - House of Commons Library." House of Commons Library. September 27, 2022. <https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-8911/>.

- Megie. 2004. *Dictionnaire Des Politiques Publiques*. Dictionnaire des politiques publiques,. 5th ed. Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
- Melissa Macdonald. 2019. “The UK’s Future Immigration System.” CBP8711. *House of Commons Library*. House of Common Library.
- n.d, ed. 2019. *THE QUEEN’S SPEECH AND ASSOCIATED BACKGROUND BRIEFING, ON THE OCCASION OF THE OPENING OF PARLIAMENT ON MONDAY 14 OCTOBER 2019*. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
- “New Immigration System: What You Need to Know.” 2023. GOV.UK. August 11, 2023. <https://www.gov.uk/guidance/new-immigration-system-what-you-need-to-know#full-publication-update-history>.
- Octavia. 2021. “Kebijakan Imigrasi Inggris Pasca Brexit Dan Implikasinya (Studi Kasus Krisis Bahan Bakar Di Inggris).” *N.d*, December.
- Office, Great Britain. Home. 2020. *The UK’s Points-Based Immigration System: Further Details*.
- Office, Home. 2020a. “Immigration Act Receives Royal Assent: Free Movement to End on 31 December 2020.” *GOV.UK*, November 11, 2020. <https://www.gov.uk/government/news/immigration-act-receives-royal-assent-free-movement-to-end-on-31-december-2020>.
- . 2020b. “Immigration Act Receives Royal Assent: Free Movement to End on 31 December 2020.” *GOV.UK*, November 11, 2020. <https://www.gov.uk/government/news/immigration-act-receives-royal-assent-free-movement-to-end-on-31-december-2020>.
- P, Garraud. 2004. “*Agenda/Émergence*. Vol. 49–56. Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques,.

- Patrick, Kenis, and Volker Scheneider. 1991. *Policy Networks and Policy Analysis : Scrutinizing a New Analytical Toolbox*. Vol. 25–29.
- Rahman, Fitra Agung Aulia. n.d. “Masyarakat Inggris Terhadap Imigran Uni Eropa Dalam Peristiwa Brexit.” *Kumparan*. <https://kumparan.com/freedom-hitler/masyarakat-inggris-terhadap-imigran-uni-eropa-dalam-peristiwa-brexit-1w1nSQ9Ai8k>.
- RINY DWISHANIA SUTRISNO. 2022. “DAMPAK REFERENDUM BREXIT TERHADAP KEBIJAKAN INGGRIS DALAM MENGATASI MASALAH IMIGRAN.” Thesis, UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR.
- Sari, Amanda Puspita. 2016. “Usai Brexit, Serangan Rasisme Meningkat di Inggris.” *Internasional*, June 28, 2016. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160628100222-134-141468/usai-brexit-serangan-rasisme-meningkat-di-inggris>.
- Sd, Hardi Alunaza, and Virginia Sherin. 2018. “Pengaruh British Exit (Brexit) Terhadap Kebijakan Pemerintah Inggris Terkait Masalah Imigran.” *Intermestic : Journal of International Studies* 2 (2): 156. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v2n2.4>.
- Secretary of State for the Home Department. 2020. *The UK’s Points-Based Immigration System*. APS Group.
- Sri, Suwistri. 2016. “Konsep Dasar Kebijakan Publik.” *Analisis Kebijakan Publik*.
- Sudaryono, Pungky Amalia. 2016. “ALASAN INGGRIS KELUAR DARI KEANGGOTAAN UNI EROPA PADA REFERENDUM 2016.” <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7719>.
- Sumption, Madeleine, and Denis Kierans. 2022. “Integration in the UK and the Post-Brexit immigration system - Migration Observatory.” Migration Observatory.



2022. <https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/commentaries/integration-in-the-uk-and-the-post-brex-it-immigration-system/>.

Syal, Rajeev. 2020. "Points-based UK immigration bill passes initial Commons stage."

*The Guardian*, May 18, 2020. <https://www.theguardian.com/uk-news/2020/may/18/points-based-uk-immigration-bill-passed-by-parliament>.

"The UK's points-based immigration system: an introduction for employers (accessible version)." 2022. GOV.UK. 2022.

<https://www.gov.uk/government/publications/uk-points-based-immigration-system-employer-information/the-uks-points-based-immigration-system-an-introduction-for-employers>.

"The UK's Points-based Immigration System: Information for EU Citizens." 2023.

GOV.UK. September 8, 2023. <https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens>.

"The UK's Points-based Immigration System: Policy Statement." 2020. GOV.UK. July

10, 2020. <https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement/the-uks-points-based-immigration-system-policy-statement>.

University of Oxford. 2024. "Net migration to the UK - Migration Observatory."

Migration Observatory. January 22, 2024.

<https://migrationobservatory.ox.ac.uk/resources/briefings/long-term-international-migration-flows-to-and-from-the-uk/#kp2>.

Walsh, Will Somerville Will Somerville and Peter William. 2021. "United Kingdom's

Decades-Long Immigration Shift Interrupted by Brexit." Migrationpolicy.Org.

2021. <https://www.migrationpolicy.org/article/united-kingdom-shift-immigration-interrupted-brexit-pandemic>.

Wegrich, Kai, and Werner Jann. 2006. "Theories of the Policy Cycle." In *Public Administration and Public Policy*, 43–62.

<https://doi.org/10.1201/9781420017007.pt2>.